

# Multikulturalisme, Konsep yang Terus L

DALAM tahun-tahun terakhir, banyak orang bicara mengenai multikulturalisme. Namun, multikulturalisme belumlah menjadi wacana publik. Antropolog UI Parsudi Suparlan mengakui bahwa walau multikulturalisme telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia, namun bagi umumnya orang Indonesia multikulturalisme adalah sebuah konsep yang masih asing.

**K**ETIKA pada 16-19 Juli 2002 di Denpasar, Bali, diselenggarakan Simposium Internasional *Ketiga Jurnal Antropologi Indonesia* dengan tema utama "Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural" jangalah membayangkan 400 pesertanya adalah orang-orang yang paham betul konsep itu. Bahkan seorang pengajar sebuah universitas negeri pada hari pembukaan mengajukan pertanyaan yang memperlihatkan ketidakmengertiannya akan konsep itu.

Masyarakat multikultural adalah suatu hal yang terus dicari, terus dibentuk. Multikulturalisme adalah sesuatu yang terus diperdebatkan, dicari bersama, kata antropolog UGM Irwan Abdullah ketika menguraikan kesimpulan akhir sementara simposium itu.

Inilah memang tujuan dari simposium itu. Menjadi suatu proses pembelajaran bersama mengenai apa yang harus dilakukan kalau mau menciptakan suatu masyarakat yang bersifat multikultural.

Pemimpin Redaksi *Jurnal Antropologi* MA Yunita T Winarto dalam menguraikan visi dan misi simposium itu mengatakan skala kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di mana-mana di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir merupakan indikator terbaiknya hak-hak dan eksistensi kebudayaan-kebudayaan lokal di antara ratusan kelompok etnis dan sosial di seluruh negeri oleh negara. Selama lebih dari tiga dekade, dalam zaman Orde Baru, peningkatan efisiensi dan produktivitas program pembangunan pemerintah dilakukan melalui upaya menghomogenkan beragam kebudayaan di Indonesia. Kecenderungan homogenisasi kebudayaan itu didorong oleh ke-

butuhan akan stabilitas. Gaya memerintah yang otoriter dan persaingan yang tak seimbang dalam memanfaatkan kesempatan dan sumber daya telah mendorong tindakan rakyat untuk menuntut keadilan dalam berbagai bentuk.

Sedang Irwan Abdullah menyebutkan bahwa mau tidak mau kita harus meninggalkan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) menuju masyarakat multikultural. Definisi-definisi yang ada secara konseptual pada kaum akademisi dan praktisi dalam praktik sosial dan kebijakan pada sistem masyarakat majemuk sudah tidak bisa lagi memecahkan masalah karena sifatnya yang terlalu hegemonis, yang menyebabkan kebudayaan-kebudayaan mengalami peminggiran secara sistematis. Dulu arus demokrasi tidak sekuat sekarang, sehingga publik masih bisa tersublimasi dengan satu sistem sosial politik yang diinstruksikan oleh negara. Pada saat negara kehilangan kendali akibat proses globalisasi serta proses demokratisasi yang begitu kuat, maka publik tidak lagi melihat negara sebagai *agency* yang dominan, sehingga peluang-peluang untuk berbeda pun menjadi terbuka. Perubahan zaman itu mengharuskan definisi ulang nilai-nilai.

Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mempertahankan eksistensi dan hak-hak mengembangkan kebudayaan-kebudayaan lokal dalam sebuah hubungan dialektik menuju Indonesia Baru, kata Yunita. Sejumlah 200 makalah yang dibicarakan selama empat hari dalam 25 panel dan 88 sesi simposium itu berupaya menjawab tantangan itu, dengan arah penting bagaimana membentuk sebuah bangsa Indonesia yang kuat dengan suatu masyarakat multikultural dalam sebuah negara yang dinamis.

## Dalam kesederajatan

Dalam pidato utama pada pembukaan simposium Parsudi Suparlan mengingatkan pada cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru berupa sebuah masyarakat sipil demokratis, dengan tegaknya hukum untuk keadilan, pemerintah yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang menyejahterakan rakyat Indonesia. "Bangunan Indonesia Baru itu adalah sebuah masyarakat multikultural Indonesia, hasil reformasi dan pembalikan tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak masyarakat majemuk," kata dia.

Kalau selama puluhan tahun corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah keanekaragaman suku-bangsa, sudah saatnya corak masyarakat Indonesia menjadi keanekaragaman kebudayaan yang ada.

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, kata Suparlan, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Antropolog UI itu beranggapan proses reformasi dengan cita-cita Indonesia Baru yang sekarang tampaknya mengalami kemacetan itu sebaiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meningkatkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia.

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil, maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi so-

sial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakan hukum bagi keadilan. "Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada pada tingkat lokal maupun nasional dan berbagai corak dinamikanya," kata Suparlan.

Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari para pelakunya. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara hukum, kata dia.

Perluasan ruang publik, ruang sosial yang memungkinkan tampilnya ekspresi-ekspresi kebudayaan juga disebutkan oleh Irwan Abdullah dalam kaitannya dengan desentralisasi. Proses desentralisasi yang sedang terjadi sekarang sebenarnya mengharuskan redefinisi terhadap sistem politik secara keseluruhan, karena kalau tidak, maka itu hanya akan memindahkan masalah-masalah diversitas kebudayaan, bukan memecahkannya.

"Desentralisasi tidak dengan sendirinya menyebabkan terbukanya ruang-ruang yang lebih luas atau lebih longgar bagi diversitas kebudayaan. Diversitas kebudayaan baru bisa mendapat tempat kalau desentralisasi juga berarti perluasan dari ruang publik, ruang sosial yang memungkinkan tampilnya ekspresi-ekspresi kebudayaan," kata Abdullah. Masyarakatlah yang harus mendefinisikan ruang politik macam apa yang diinginkan supaya diferensiasi atau diversitas kebudayaan bisa mempunyai tempat.

Menurut dia multikulturalisme mengharuskan kita mendefinisikan ulang dua hal, yaitu konsep kewargaan dalam pengertian posisi individu dalam komunitas (hubungan hori-